



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang terarah terprogram dan sesuai prioritas, maka perlu disusun dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disepakati oleh badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tanggal 24 Januari 2022;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tanggal 3 Februari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022. (Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini).
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko
Pada Tanggal : Februari 2022

PIMPINAN DPRD
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
KETUA,



FRANGKY CHENDRA

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

DAFTAR RANPERDA
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022

No.	Jenis	Tentang
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Irigasi
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 - 2033
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Barang Milik Daerah
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Coroporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 - 2030
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Bangunan Burung Walet
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyertaan Modal BUMD
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Pendirian BUMD Anugerah Nusantara Jaya
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Kelurahan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
14.	Rancangan Peraturan Daerah	Pedoman Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Desa dan Pekerja Bukan Penerima Upah
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
16.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
17.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Limbah Domestik
18.	Rancangan Peraturan Daerah	Persetujuan Bangunan Gedung
19.	Rancangan Peraturan Daerah	Penanaman Modal
20.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

21.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022
22.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
23.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
24.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kepemudaan
25.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pemukiman Kumuh
26.	Rancangan Peraturan Daerah	Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin;

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 6 Februari 2022

PIMPINAN DPRD

KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA,



FRANGKY CHENDRA